



## **PKM Pengembangan Industri Kerakyatan di Kecamatan Tondano Selatan**

Marthinus Mandagi<sup>1</sup>, Sisca B. Kairupan<sup>2</sup>

### **Keywords :**

Ekonomi;  
Tondano Selatan;  
Aparatur

### **Corespondensi Author**

Universitas Negeri Mandao

Email:

[marthinusmandagi@unima.ac.id](mailto:marthinusmandagi@unima.ac.id)

### **History Artikel**

**Received:** 01-06-2019

**Reviewed:** 07-07-2019

**Revised:** 28-07-2019

**Accepted:** 01-08-2019

**Published:** 31-08-2019

### **ABSTRAK**

*Tujuan dari pengabdian ini adalah: (1). Untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya, (2). Untuk mengetahui peranan lembaga ekonomi masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya, (3). Untuk mengetahui dan mengidentifikasi peluang usaha potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya. Pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Tondano Selatan. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini adalah: (1). Terciptanya kenyamanan aparatur pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam proses pengadministrasian di kelurahan, (2). Tersedianya fasilitas kerja yang efektif. (3) Tercapainya proses administrasi yang efektif dan efisien.*

### **ABSTRACT**

*The objectives of this service are: (1). To identify the socio-economic conditions of the people of South Tondano District and its surroundings, (2). To find out the role of community economic institutions in South Tondano District and its surroundings, (3). To find out and identify potential business opportunities that can be developed to increase the income of the people of South Tondano District and its surroundings. This service was held in the District of South Tondano. The results obtained from this service are: (1). The creation of the comfort of the village government apparatus and the community in the administration process in the kelurahan, (2). Availability of effective work facilities. (3) Achieving an effective and efficient administration process.*

## **PENDAHULUAN**

### **Analisis Situasi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang lebih kecil dan

tertinggal. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* pada masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Pada hakikatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga dapat membangun kekuatan ekonomi Indonesia secara umum berdasarkan pada

keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki.

Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dengan industri. Untuk mencapai ini diperlukan kekuatan dan kemampuan sektor pertanian guna menunjang pertumbuhan di sektor industri yang kuat dan maju. Kondisi tersebut dapat dilihat dari arah pembangunan oleh pemerintah, yakni membangun sektor pertanian yang tangguh. Hal tersebut sangat beralasan karena lebih dari 70% penduduk di pedesaan bergantung pada sumber pendapatan dari pertanian.

Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan. Pada umumnya setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi yang dimaksud sebagian besar berada di daerah pedesaan. Potensi tersebut antara lain 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6)

pengembangan sektor industri; dan 7) potensi kepariwisataan.

Pemberdayaan potensi ekonomi lokal di wilayah Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya menjadi peluang untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan maju berbasis ekonomi kreatif yang dapat memenuhi kebutuhan lokal maupun regional. Banyaknya sektor-sektor ekonomi yang sudah berjalan di wilayah Kota maupun Provinsi dapat ditingkatkan menjadi salah satu motor penggerak dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang telah terbukti pada saat krisis menjadi lapis kedua ekonomi yang *resistance*. Pemberdayaan masyarakat (misalnya pengrajin, peternak, petani dan pedagang) melalui pembangunan kapasitas menjadi salah satu *effort* yang dapat dikembangkan melalui fasilitasi Pemerintah Daerah melalui keberpihakan berupa perencanaan yang tepat, regulasi yang tegas, konsistensi program, tanggung jawab lembaga (*stake holders*) serta peran aktif masyarakat.

### **Permasalahan Mitra**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pengabdian ini adalah:

- 1) Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya?

- 2) Bagaimana peranan lembaga ekonomi masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya?
- 3) Bagaimana peluang usaha potensial yang dapat dikembangkan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya?

### Solusi Dan Target Luaran

Tujuan Yang Diharapkan Dapat Dicapai Pada Pengabdian Ini Adalah Untuk:

1. Untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya.
2. Untuk mengetahui peranan lembaga ekonomi masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi peluang usaha potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya.

Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan diperoleh beberapa manfaat antara lain:

- 1) Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan dalam rangka identifikasi kondisi sosial

ekonomi masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya.

- 2) Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan dalam rangka menentukan usaha masyarakat Kecamatan Tondano Selatan dan sekitarnya yang diperkirakan potensial untuk dijadikan proyek pengembangan pada masyarakat..

Perencanaan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan bentuk intervensi kelembagaan publik. Diperlukannya intervensi publik didasari oleh pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat optimal dicapai akibat terjadinya kegagalan pasar yang berlangsung tidak sempurna. Fenomena *market failure* dapat tumbuh sebagai akibat sistem dapat menyediakan produk-produk yang diperlukan atau akibat kegagalan alokasi sumberdaya. *Market failure* akan terjadi manakala berbagai eksternalitas negatif gagal direduksikan dalam harga pasar, atau akibat adanya praktek monopoli-oligopoli, atau juga akibat kegagalan-kegagalan pemerintah.

Secara teoritis, kegagalan pasar akan selalu muncul manakala kompetisi sempurna tidak terjadi. Kegagalan pasar dapat menyebabkan kemunduran (berdampak negatif) kewenangan atau hak legal sebagai perencana dan pelaksana kepentingan-

kepentingan publik. Publik sebagai terjemahan dari kepentingan publik. Perlunya lembaga publik juga didasari pemahaman bahwa beberapa bentuk fasilitas diyakini hanya dapat berfungsi dengan optimal jika diserahkan pada kelembagaan publik untuk menyediakannya.

Kelembagaan pemerintah dibangun secara berhirarki dengan orientasi yang berbeda. Lembaga pemerintahan berskala nasional, sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berskala daerah.

Intervensi publik oleh kelembagaan pemerintah harus diusahakan untuk mendorong berjalannya mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna hanya dapat dicapai jika ada keselarasan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap sumberdaya-sumberdaya

produksi. Kelembagaan masyarakat lokal yang kuat dan stabil dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap terbentuknya mekanisme pasar, akibat adanya kesetaraan akses masyarakat. Kegagalan proses mekanisme pasar, pada gilirannya akan menimbulkan *market failure*.

Kelembagaan pemerintahan dengan sistem terpusat seringkali tidak kuat kelembagaan di bawahnya sehingga cenderung lambat di dalam mengantisipasi perkembangan-perkembangan lokal.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah selama lebih dari dua dekade mampu tumbuh dengan rata-rata 7,2 % per tahun. Sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan berhasil dipacu produktivitasnya sehingga secara nasional pernah dicapai swasembada beras pada era 1984-1987. Namun demikian, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang utama sejauh ini adalah yang bersumber dari kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam (migas, kayu, dll).

Sektor industri manufaktur yang diyakini merupakan sektor yang akan membawa ke modernisasi pembangunan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara cepat ternyata terutama berkembang tanpa keterkaitan yang kokoh dengan sektor primer utama dan tidak berbasis sumberdaya alam lokal. Krisis ekonomi memperjelas kerentanan pembangunan industri yang tidak berbasis sumberdaya domestik, sedangkan sektor agribisnis, termasuk agroindustri mampu tetap tumbuh. Di masa yang akan datang, pendekatan pembangunan yang didasarkan atas kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam tidak dapat lagi dipertahankan akibat semakin terbatasnya sumberdaya alam yang tidak terbarui (*unrenewable resources*) serta semakin menurunnya kapasitas produksi sumberdaya alam terbarui (*renewable resources*).

Di lain pihak, selain berbasis sumberdaya alam domestik yang terbaru, pembangunan di masa datang perlu lebih menekankan pengembangan masyarakat lokal melalui upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal. Sering dengan pemberlakuan otonomi daerah, pemerintah lokal yang akan memiliki kewenangan dan peranan perencanaan pembangunan yang lebih besar memiliki kemampuan yang lebih baik dan lebih berinisiasi dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Suatu kawasan strategis adalah suatu kawasan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial (lintas wilayah) dan lintas pelaku. Dengan demikian, perkembangan wilayah strategis memiliki efek sentrifugal karena dapat menggerakkan secara efektif perkembangan ekonomi sektor-sektor lainnya, perkembangan wilayah di sekitarnya serta kemampuan menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas, dalam arti tidak terbatas ekonomi masyarakat kelas-kelas tertentu saja.

Upaya menilai potensinya yang dapat menimbulkan dampak multiplier terhadap perkembangan sektoral lainnya dan wilayah sasaran, diperlukan kajian-kajian secara seksama mengenai potensi keterkaitan (*linkages*). Suatu kawasan dan komoditi dinilai strategis jika memiliki potensi kaitan

ke belakang dan ke depan yang kuat. Ke arah belakang (*backward*) diharapkan pengembangan suatu kawasan strategis dapat menyerap tenaga kerja serta memacu pertumbuhan aktivitas-aktivitas penyedia input baik berupa produk-produk input (bahan mentah, bahan baku dan alat) maupun produk-produk jasa penunjang.

Ke depan (*foreward*) pengembangan kawasan diharapkan berpotensi memicu berkembangnya aktivitas-aktivitas pengolahan dan pemanfaatan produk output kawasan. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan aktivitas-aktivitas pasca panen atau pasca penangkapan (aktivitas pengolahan/agroindustri hingga distribusi-pemasaran). Dalam dimensi spasial, keterkaitan ke belakang maupun ke depan yang tumbuh terutama dengan aktivitas ekonomi wilayah yang secara geografis berlokasi di sekeliling kawasan produksi/penangkapan sehingga pengembangan kawasan pada dasarnya adalah suatu bentuk pengembangan wilayah sasaran, dimana sistem agribisnis merupakan salah satu *prime mover* yang signifikan.

Upaya memperluas sebaran rentang aktivitas agribisnis, khususnya dengan menumbuhkan kegiatan-kegiatan off-farm, berupa pengolahan produk primer dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan komunitas kawasan (*community empowerment*) karena dapat memperkokoh

posisi tawar pelaku-pelaku ekonomi lokal. Untuk itu di dalam perencanaan kawasan sangat diperlukan pemahaman mengenai struktur keterkaitan spasial antara kawasan wilayah dimaksud dengan wilayah lainnya/sekelilingnya.

Dalam wacana pekerjaan sosial, istilah *empowerment* yang sekarang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan bukanlah sesuatu yang baru. Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai hakekat yaitu pada pertolongan dan pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang mengalami disfungsi. Berdasarkan hal itu, sebenarnya sejak awal perkembangan pekerjaan sosial selalu menggunakan tema-tema seperti kemandirian, kepercayaan diri, kefungsi sosial, dan *empowerment*.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *empowerment* maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud ketidakberdayaan (*powerlessness*). Para pakar teori motivasi diantaranya Martin Seligman, Maier, Overmier, dan Hiroto (1976) mengatakan ketidakberdayaan dan *empowerment* sangat terkait dengan motivasi dan proses belajar. Oleh karenanya mereka mengembangkan suatu teori yang dinamakan teori ketidakberdayaan yang dipelajari (*learned helplessness*). (Fahrudin, hal:13) Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga

dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena *power* bukan sekedar "daya", tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu", tetapi juga "mempunyai kuasa". (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007, hal:1) Ife (1995) mengatakan *empowerment aims to increase the power of disadvantaged* (pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak beruntung). Swift dan Levin (1987) cenderung mengartikan *empowerment* sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (*reallocation of power*). Rappaport (1984) mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan seperti kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat Indonesia, yaitu kebhinekaan. Seperti halnya pada masyarakat Kecamatan Tondano Selatan begitu banyak yang

memiliki begitu banyak kearifan lokal sehingga dapat menjadi modal dasar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakatnya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia umumnya dan Masyarakat Kecamatan Tondano Selatan khususnya yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007)

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007):

- a. Tahap pertama adalah penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi “pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat *kognisi*, *belief*, dan *healing*. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain)

- b. Tahap kedua adalah pengkapasitasan. Inilah yang sering disebut dengan *capacity building*, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau *capacity building* untuk membuat mereka “cakap” (*skilfull*) dalam mengelola otonomi yang diberikan. Proses *capacity building* terdiri atas tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.
- c. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri – atau *empowerment* dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

## Target

Target menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Target juga merupakan bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana yang dikatakan dalam pendahuluan, bahwa pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran dan pendapat sebagai perwujudan kesetiaan, atau suatu kesetiaan yang dilakukan dengan ikhlas dengan rasa tanggung jawab.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa target pengabdian adalah sasaran dari kegiatan atau perbuatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Adapun terdapat banyak sasaran dalam pengabdian yaitu sebagai berikut:

Sasaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

1. Meningkatnya pengembangan ilmu, teknologi dan seni untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat dan daerah
2. Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakkan potensi

lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi di kantor lurah.
4. meningkatkan kestabilan dan kelancaran dalam pelaksanaan administrasi desa.
5. Menciptakan lingkungan yang asri dan bersih.

## METODE

### Strategi Pelaksanaan Pengabdian

Kami memilih melakukan pengabdian di kecamatan setempat dikarenakan di kecamatan tersebut masih sangat membutuhkan pengembangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Pengarahan dari Camat/ Pejabat terkait
2. Melakukan pengadministrasian.
3. Membersihkan Kantor dan tanaman serta pembuatan tanda petunjuk parker.

Persiapan melakukan proses dalam pengabdian di Kecamatan Tondano Selatan, dalam melakukan proses pengabdian di daerah tersebut membutuhkan keperluan yaitu :

1. Buku dan pulpen
2. Laptop
3. Skop

4. Parang
5. Sapu
6. Gerobak

### **Kegiatan Yang Dilakukan**

Adapun kegiatan yang akan kami lakukan adalah :

1. Membuat buku tamu dan buku piket
2. Membantu proses Peningkatan Industri Kerakyatan
3. Membantu membersihkan halaman kantor yang sangat kotor menjadi bersih sehingga terlihat lebih indah
4. Membantu memudahkan masyarakat yang sedang dalam mengurus mencari dan menemukan Inde dalam rangka pengembangan Industri Kerakyatan di Kecamatan Tondano Selatan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selaras dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 45 telah ditegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal tersebut juga menyatakan dengan tegas bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh seluruh

lini kampus sebagai bagian dari sivitas akademika dalam pelaksanaan/penerapan hilirisasi, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengabdian terdapat banyak aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengabdian kepada masyarakat itu sendiri yang meliputi empat aspek, yaitu a) Aspek Sumber Daya, b) Aspek Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat, c) Aspek Luaran Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan d) Aspek Revenue Generating. Mewujudkan kestabilan dan kelancaran proses administrasi, tentu merupakan harapan besar dari pelaksana kegiatan pengabdian. Dimana bertolak belakang dari kebutuhan masyarakat yang menginginkan agar segala urusan administrasi di kantor lurah berjalan cepat dan tidak berbelit-belit. Dengan adanya pengabdian yang telah kelompok kami lakukan, maka tercapai beberapa manfaat yang adalah sbb:

- a) Terciptanya kenyamanan aparatur pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam proses pengadministrasian di kelurahan.
- b) Tersedianya fasilitas kerja yang efektif.
- c) Tercapainya proses administrasi yang efektif dan efisien.

Melalui kegiatan pengabdian yang telah dilakukan maka kemudahan dan kelancaran dalam proses administrasi di kelurahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu dapat menjadi contoh penyelenggaraan pengadministrasian di kantor kelurahan untuk kedepannya menjadai lebih baik.

### **Produk Pengabdian**

Produk pengabdian merupakan segala sesuatu yang berbentuk barang atau jasa yang memiliki guna ataupun nilai yang dihasilkan saat seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan baik, baik berupa pikiran atau tindakan sebagai perwujudan kesetiaan yang dilakukan dengan ikhlas.

Adapun produk-produk pengabdian yang kelompok kami hasilkan dalam pengabdian kami selama satu minggu di Kantor Lurah Kelurahan Maesa Unima yaitu:

- a) Pengadaan buku tamu dan buku piket.
- b) Pengadaan struktur susunan jabatan lurah Kelurahan Maesa Unima dari tahun 2006 sampai 2018.
- c) Lingkungan kantor kelurahan yang bersih dan rapi.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan. Pada umumnya setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Potensi yang dimaksud sebagian besar berada di daerah pedesaan. Potensi tersebut antara lain 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan sektor industri; dan 7) potensi kepariwisataan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Departemen Perdagangan. 2008. Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025.
- Rappaport, J. 1984. Studies in Empowerment: Introduction to the issue, Prevention in Human Issue. USA.
- Swift C, Levin G. 1987. Empowerment: An Emerging Mental Health Technology. J Primary Prevention, USA.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

Wrihatnolo & Dwidjowijoto. 2007.  
Manajemen Pemberdayaan. Jakarta:  
PT Elex Media Komputindo.

***THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK***